

Islam dan Demokrasi di Indonesia (I)

Kamis, 03 Juli 2014, 06:00 WIB

Republika/Daan



Azyumardi Azra

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Azyumardi Azra

Meski Indonesia telah menerapkan demokrasi multipartai yang dapat dikatakan liberal selama 15 tahun terakhir-sejak 1999 masa pascaotoritarianisme Presiden Soeharto-masih banyak kalangan, khususnya luar negeri, yang belum yakin dengan masa depan demokrasi di negeri ini.

Masih bertahan semacam skeptisisme di antara mereka, khususnya menyangkut hubungan antara Islam dan demokrasi di negara yang berpenduduk mayoritas Muslim seperti Indonesia. Dalam konteks itu, tidak mengherankan jika pembicaraan tentang Indonesia, Islam, dan demokrasi menjelang dan pascapilpres 2014 masih menjadi agenda percakapan dalam berbagai konferensi dan seminar, khususnya di luar negeri.

Sebagai contoh adalah 'Round Table Seminar' tentang subjek tersebut yang diselenggarakan Indonesia-Nederland Society (INS) bekerja sama dengan KBRI untuk

Negeri Belanda di Den Haag pada 26 Juni lalu di Gedung Senat Belanda.

Presiden Senat Belanda (Mrs) Ankie Broekers-Knol dalam pembukaan Seminar Meja Bundar menyatakan, mengingat hubungan historis Belanda-Indonesia yang panjang, tidak mengherankan jika ada kalangan masyarakat Belanda yang ingin mengetahui perkembangan terakhir demokrasi di Indonesia. Meski di negeri Belanda sendiri juga terdapat warga Indonesia, tidak banyak informasi tentang dinamika demokrasi Indonesia, khususnya Pemilu 2014.

Apalagi, banyak warga Belanda yang tidak yakin tentang kompatibilitas Islam dengan demokrasi di Indonesia. Melihat perkembangan beberapa negara Arab pasca-Arab Spring, skeptisisme tentang kompatibilitas Islam dalam masyarakat Belanda umumnya tidak bisa lain hanyalah kian menguat.

Pembicaraan tentang Islam dan demokrasi, khususnya dalam konteks Indonesia, menghadirkan dua pembicara, yaitu Dr Nikolaos van Dam dan penulis "Resonansi" ini. Van Dam adalah mantan dubes Belanda di Indonesia, Jerman, Turki, Mesir, dan Irak (1988-2010).

Selain itu, Van Dam juga pernah bertugas sebagai diplomat di Libya, Lebanon, Yordania, wilayah pendudukan Palestina, Siprus, Azerbaijan, dan Timor Leste. Sarjana-cum-diplomat dengan disertasi tentang sejarah dan politik Suriah yang sampai 2011 lalu telah dicetak ulang sampai empat kali.

Agaknya karena latar belakang keilmuan dan pengalaman sebagai diplomat Belanda di banyak wilayah kaum Muslimin, Van Dam memiliki pandangan lebih objektif dan empati pada Islam dan kaum Muslim. Karena itulah, ia pernah mendapat kritik sengit dari Geert Wilders, figur politik ultrakanan anti-Islam dan Muslim yang menganggapnya terlalu berpihak kepada Islam dan kaum Muslimin.

Memulai presentasinya, Nikolaos van Dam mengajukan pertanyaan hipotetis kepada dirinya sendiri dan audiens, apa yang berkecamuk dalam pikiran kita masyarakat Eropa jika ada ormas besar Islam Indonesia seperti Muhammadiyah, misalnya, mengadakan konferensi di Jakarta dengan topik: "Apakah Kristen Kompatibel dengan Demokrasi?" Apakah masyarakat Eropa tidak tercengang jika ada orang atau organisasi Islam Indonesia bertanya dengan mengambil kasus dan pengalaman Eropa? Apakah Kristianitas cocok dengan demokrasi atau tidak?

Dalam pikiran Van Dam, merespons pertanyaan itu, masyarakat Eropa bakal berkata Kristianitas dan demokrasi berjalan beriring sangat baik di Eropa. Karena itu, tidak perlu lagi diskusi akademik guna membuktikannya. Apalagi kalau yang mempersoalkan itu adalah "orang luar" seperti kaum Muslimin Indonesia. "Bahkan, dalam hal ini agaknya kita (masyarakat Eropa) akan berpikir tanpa argumen panjang, demokrasi bertumbuh subur di Eropa terlepas dari apakah demokrasi itu menghasilkan pemerintah sekuler

atau diilhami agama," tegas Van Dam.

Memperjelas argumennya, Van Dam kembali mengajukan pertanyaan retorik: Apakah demikian kenyataannya dalam sejarah Eropa? Bukankah kita (Eropa) memiliki kediktatoran paling jelek di Eropa-di negara-negara yang pada waktu itu penduduknya adalah mayoritas penganut Kristianitas paling taat? Bukankah masa Hitler di Jerman, Mussolini di Italia, dan Jenderal Franco di Spanyol merupakan bukti nyata bahwa Kristianitas (atau menjadi seorang pemeluk Kristianitas) dan diktatorisme dapat sejalan seiring?

Menurut Nikolaos van Dam, contoh-contoh itu menampakkan bagian-bagian besar penduduk Kristianitas di Eropa secara antusias mendukung rezim-rezim diktator yang jelas nondemokratik yang berujung pada tewasnya jutaan orang. "Berdasarkan contoh-contoh pengalaman ini, saya dapat pula menyatakan bahwa Kristianitas dan demokrasi tidak kompatibel. Tapi, saya pasti diolok-olok dengan menyatakan seperti itu karena saya dianggap mengucapkan suatu *nonsense*, hal tidak masuk akal".

Tentu saja sekarang ini-setelah melalui berbagai pengalaman tadi-sebagian besar Eropa adalah demokrasi, dan mayoritas terbesarnya tetap pemeluk Kristianitas. Karena itu, menurut Van Dam, orang tidak perlu lagi pergi ke *Bible* atau teks suci Kristianitas lain untuk membuktikan tesis bahwa Kristianitas dan demokrasi kompatibel.

Dengan logika yang sama, orang juga tidak perlu mengkaji Alquran atau teks Islam lain untuk meyakinkan kita bahwa Islam dan demokrasi dapat seiring sejalan. Kenyataan ini terlihat di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim seperti Indonesia, Pakistan, Bangladesh, dan Turki. Bahkan, Indonesia adalah negara demokrasi terbesar ketiga setelah India dan AS.

REPUBLIKA ONLINE, 10 Juli 2014

<http://www.republika.co.id/berita/kolom/resonansi/14/07/09/n8g3p4-islam-dan-demokrasi-di-indonesia-2>

Islam dan Demokrasi di Indonesia (2)

Kamis, 10 Juli 2014, 07:00 WIB



Azyumardi Azra

A+ | [Reset](#) | A-

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Azyumardi Azra

Percakapan tentang Islam dan demokrasi di dunia Muslim, khususnya Indonesia, di Gedung Senat Belanda 25 Juni 2014 merupakan kesempatan sangat baik untuk melihat sejarah dan dinamika demokrasi dalam perspektif komparatif. Perspektif ini perlu bukan hanya di antara negara-negara di dunia Muslim, tetapi juga antara negara Muslim tertentu seperti Indonesia dengan kawasan Muslim lain dan sekaligus juga dengan Barat.

Dalam konteks itu terletak signifikansi Nikolaos van Dam, mantan dubes Belanda di Indonesia dan sejumlah negara dan kawasan dunia Muslim lain. Penilaian dan kritik *from within*, dari orang dalam sendiri, terhadap realitas historis dinamika demokrasi di Eropa lebih bisa masuk akal dan lebih mungkin diterima masyarakat Eropa sendiri daripada, misalnya, diberikan orang luar (*from without*), seperti penulis Resonansi ini, yang kemudian tidak perlu lagi memberikan penjelasan panjang lebar.

Setelah mengkritik sejarah demokrasi Eropa yang juga diwarnai diktatorisme Hitler, Musolini, dan Jenderal Franco, van Dam mengkritik kecenderungan sikap tidak konsisten masyarakat Kristen Barat ketika sampai ke Islam dan masyarakat Muslim. Menurut dia, banyak contoh negara-negara Barat yang menyeru warga Palestina untuk menjalankan pemilu demokratis. Tetapi, ketika Hamas menang, negara-negara Barat memboikot hasil pemilu tersebut dan menolak berhubungan dengan pemerintahan lokal Hamas karena posisinya yang anti-Israel.

Ia menambahkan, kasus yang hampir sama juga terjadi sebelumnya ketika Front

Islamique de Salut (FIS) menang pemilu di Aljazair. Kemenangan FIS ditolak militer yang umumnya didukung Barat. Pihak terakhir ini khawatir jika Hamas atau FIS berkuasa, mereka menyalahgunakan demokrasi untuk memerintah dan memaksakan kekuasaannya secara tidak demokratis.

Bagaimana pengalaman Indonesia? Nikolaos van Dam melihat prasangka Barat bahwa demokrasi dan Islam tidak kompatibel tidak berdasar dalam konteks Indonesia. Orang tak bisa memasukkan semua organisasi dan kelompok berorientasi Islam sebagai tidak cocok dengan demokrasi.

Jelas terdapat sejumlah organisasi dan kelompok Islam berorientasi demokrasi, misalnya, ormas besar Muslim seperti Muhammadiyah dan NU yang mewakili bagian terbesar umat Islam Indonesia. Pada pihak lain ada pula organisasi jauh lebih kecil seperti JI atau HTI yang berorientasi tidak demokratis. Mereka hanya ingin memanfaatkan dan menyalahgunakan sistem demokrasi untuk mencapai tujuan mereka yang tidak demokratis, bahkan mereka menolak politik demokratis dan negara-bangsa.

Dalam konteks Indonesia, berikut adalah poin sangat penting dari Van Dam, yaitu Muhammadiyah dan NU [beserta ormas-ormas semacamnya di seluruh Indonesia] adalah unik. "Mereka unik dalam pengertian bahwa kita tidak dapat menemukan organisasi besar semacam itu di bagian dunia Islam lain manapun. Mereka sekarang ini menjadi kekuatan stabilisasi yang membantu transformasi demokratis lebih lanjut negara-bangsa Indonesia."

Hal spesial lain tentang Indonesia bagi mantan dubes Belanda yang sebagian besar umurnya dihabiskan di berbagai kawasan dunia Muslim ini adalah respek pada kesatuan dalam keragaman. "Fenomena spesial di Indonesia ini tidak saya temukan di negara Arab manapun ... hal ini diabadikan dalam slogan nasional Bhinneka Tunggal Ika."

Lebih jauh, bagi van Dam, fenomena penting lainnya adalah kebiasaan mengucapkan salam (*greetings*) yang berasal dari berbagai agama berbeda. Berbagai salam itu kemudian disempurnakan dengan ucapan 'salam sejahtera bagi kita semua' yang lebih netral dan inklusif tanpa mengecualikan siapa pun.

Nikolaos van Dam mengamati banyak gejala budaya lain khas Indonesia yang membuat kaum Muslim negeri ini berbeda dengan kaum Muslimin lain di manapun. Misalnya, yang cukup khas Indonesia itu pembacaan ayat Alquran oleh perempuan [qari'ah] dalam pembukaan acara resmi dan penting. "Saya tidak melihat fenomena seperti ini di negara Muslim atau Arab manapun. Ini benar-benar tradisi Indonesia yang mencerminkan posisi perempuan dalam masyarakat."

Hal khas lain adalah bahwa di negara mayoritas Muslim lain, penggunaan nama Arab Islam sangat populer. Sebaliknya di Indonesia, khususnya di Jawa, lebih umum orang menggunakan nama tradisional Jawa. Karena alasan itu, sering sulit memastikan

identitas keagamaan orang yang bersangkutan.

Mengamati berbagai gejala itu, Nikolaos van Dam berkesimpulan, bagian besar Islam Indonesia telah mengadaptasikan diri atau telah menyatu (*embedded*) ke dalam budaya dan tradisi lokal. Bukan sebaliknya mengadaptasi budaya dan tradisi Semenanjung Arabia.

Akhirnya, untuk membuat cerita panjang menjadi singkat, ujar van Dam, Islam dan demokrasi atau secara simultan menjadi Muslim dan demokrat, sepenuhnya kompatibel di Indonesia. “Dengan mengatakan hal ini, saya harus menambahkan bahwa kelangsungan demokrasi bukanlah sesuatu hal yang *taken for granted* [sudah selesai, tidak perlu dipersoalkan lagi], baik di Indonesia maupun di negara lain manapun di dunia ini.